

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA INSANI DAN  
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
(BPKAD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**SELLA YUNITA**

**NPM. 1551030087**

**Jurusan: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

# **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA INSANI DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
(BPKAD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat)**

## **Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**SELLA YUNITA  
NPM. 1551030087**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Budimansyah, S. Th.I., M.Kom.I**

**Pembimbing II : Liya Ermawati, S.E., M. S. Ak.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi suatu entitas yang menyajikan laporan keuangan. Untuk memperoleh laporan keuangan berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) yang memiliki kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang harus diperhitungkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya. Keempat karakteristik itu adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui: 1) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, 2) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dan 3) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Skripsi ini adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat. Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah seluruh pegawai pada BPKAD Kabupaten Pesisir Barat. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 17 pegawai (responden) yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan dan beragama islam. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari skripsi ini yaitu: 1) Kompetensi Sumber Daya Insani berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang dapat dilihat pada persamaan regresi  $Y = 3,141 + 0,298 X_1$ , nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , dan  $t_{hitung}$  sebesar  $12,203 > t_{tabel}$  sebesar 2,145. 2) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada persamaan regresi  $Y = 3,141 + (-0,292) X_2$ , nilai signifikansi sebesar  $0,505 > 0,05$ , dan  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,292 < t_{tabel}$  sebesar 2,145. (3) Kompetensi SDI dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang dapat dilihat dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dan  $F_{hitung}$   $81,644 > F_{tabel}$  3,68.

## **SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sella Yunita  
NPM : 1551030087  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menjelaskan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun dibuatkan oleh orang lain, kecuali pada bagian yang telah diacukan yang disebut *footnote* atau daftar pustaka, apabila dikemudian hari ada pihak-pihak yang keberatan dan jika terbukti ada penyimpangan dalam karya ini, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tertekan oleh pihak-pihak manapun.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, September 2019  
Penulis,

Sella Yunita  
NPM. 1551030087



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA  
INSANI DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada  
BPKAD Kabupaten Pesisir Barat)

Nama : Sella Yunita  
NPM : 1551030087  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munasqosah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Budimansyah, S. Th.I., M.Kom.I  
NIP. 19770725 200212 1 001

Liya Ermawati, S.E., M. S.Ak  
NIP. 19890307 201903 2 020

Ketua Jurusan

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 19750424 200212 1 001



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat)” disusun oleh, Sella Yunita, NPM : 1551030087, program studi Ekonomi Syariah. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2019.

Waktu : 08.00 – 09.30 WIB

Ruangan : Dekanat FEBI Lantai 3 Ruang Sidang I

### Tim Penguji

Ketua : Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A (.....)

Sekretaris : Gina Ulfa S, L.C., M.E.Sy (.....)

Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak (.....)

Penguji II : Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak (.....)

### Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Baslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 19300801 200312 1 001



## MOTTO

...وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ  
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “....Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”

(Q.S. Al – Isra’ : 36)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al – Qur’an dan Terjemah Al – Aliyy (Bandung: CV Diponerogo, 2006), h. 285.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada berbagai pihak yang memberi do'a, bantuan, dukungan, motivasi dan semangat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Ahmad Tontowi dan ibunda Masna Laili yang tiada henti-hentinya mendoakan, mengingatkan, menasehati, mengasihi, menyayangi, dan memberi mendukung dalam segala aspek dalam kehidupan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjadi orang yang berguna.
2. Pembimbing Akademik bapak Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I dan pembimbing skripsi ibu Liya Ermawati, S.E.,M. S. Ak, yang telah membimbing, mengoreksi, memberi saran dan kritik untuk penulis dalam penulisan skripsi ini sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tercinta.



## **RIWAYAT HIDUP**

Sella Yunita dilahirkan di Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan pada tanggal 2 Juni 1998, anak pertama dari bapak Ahmad Tontowi dan ibu Masna Laili.

Riwayat pendidikan penulis mulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri 16 Lintang Kanan lulus pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan di MTSN Muara Pinang, lulus pada tahun 2012.
3. Penulis kemudian melanjutkan di SMAN 1 Muara Pinang, lulus pada tahun 2015.
4. Kemudian pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) melalui jalur Tes Mandiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, September 2019

Penulis,

Sella Yunita

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis haturkankan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Kompetesi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesaian Skripsi ini tidak semata hanya berbekal pengetahuan dan kemampuan penulis miliki. Tanpa adanya bantuan, dukungan, motivasi dan semangat dari berbagai pihak, tidak mungkin skripsi ini bisa terselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa syukur, hormat, dan terimakasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, sebagai Dekan FEBI UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu setiap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.S.I dan Budimansyah, S. Th.I., M.Kom.I sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa mempermudah proses skripsi ini.
3. Any Eliza, S.E., M.Ak, dan Muhammad Iqbal, S.E., M.E.I sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan pengetahuan, arahan, serta selalu memotivasi dalam terselesaikannya skripsi ini.



4. Budimansyah, S. Th.I., M.Kom.I dan Liya Ermawati, S.E.,M. S. Ak, sebagai pembimbing I dan II yang selalu membimbing, mengoreksi, memberi saran dan kritik untuk penulis dalam penulisan skripsi ini sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat LDR ku Seci Mareza, Intan Indah Sari, dan Nina Tuzahrah terimakasih telah memberiku motivasi dan semangat.
8. Luki Fikri, terimakasih telah memberi semangat, dukungan dari awal hingga akhir, serta bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Nuris Nawati dan Novilia yang sering penulis gupekin nanya-nanya mengenai metopen sampe tengah malam, menemani penulis bimbingan, dan selalu ada pada saat penulis membutuhkan. Terimakasih banyak telah membantu.
10. Sahabat kecil ku Zahara, Fitri dan Yuhana yang selalu nanya kapan wisudah terimakasih buat motivasi nya.
11. Yenita, Rizka, Ayu husnul, Yuniar terimakasih telah mewarnai proses terselesaikannya skripsi saya.

12. Teman-teman Akuntansi Syari'ah kelas C dan Teman-teman Seangkatan 2015 yang selama 4 tahun bersama dalam proses belajar, berjuang dalam menempuh proses perkuliahan seperti UTS, UAS, hingga proses skripsi.
13. Teman-teman KKN 76 (Nuy, Yossi, Lufi, Agung, Wahyu, Eliana, Ayundari, Feni, Suhel, dan Robi) yang telah memotivasi dan selalu ngajakin penulis balapan dalam menyelesaikan skripsi agar cepat sarjana.
14. Teman-teman semprop gelombang pertama, yang telah membantu dalam proses bimbingan dan berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.
16. Serta untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya dan semoga kita selalu terjalin dalam ukhuwah islamiyah kita bersama.

Bandar Lampung, September 2019

Penulis,

Sella Yunita  
1551030087



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Penjelasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Masalah .....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	14
B. Sumber Daya Insani .....	16

C. Sumber Daya Insani (SDI) dalam islam.....	19
D. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	21
E. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	25
F. Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	27
G. Komponen Laporan Keuangan Daerah.....	32
H. Penelitian Terdahulu .....	33
I. Hipotesis Penelitian.....	35
1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	35
2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ....	36
3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	38
J. Kerangka Pemikiran.....	40

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	41
B. Lokasi/Objek Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Populasi dan Sampel .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Oprasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	48
G. Metode Analisis Data .....	51



1. Uji Validitas.....	51
2. Uji Realibilitas.....	52
H. Uji Asumsi Klasik .....	52
1. Uji Normalitas .....	52
2. Uji Multikolinieritas .....	53
3. Uji Heteroskedastisitas .....	53
I. Uji Hipotesis.....	54
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
2. Uji Statistik T (pengujian secara parsial) .....	55
3. Uji Statistik F (pengujian secara simultan).....	55
J. Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....	56
<b>BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	57
1. Latar Belakang Berdiri BPKAD Kabupaten Pesisir Barat .....	57
2. Struktur organisasi BPKAD .....	59
3. Visi dan Misi BPKAD .....	81
4. Sumber Daya Pendukung .....	82
B. Gambaran Umum Responden .....	84
1. Berdasarkan Jenis Kelamin .....	84
2. Berdasarkan Usia .....	85
3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	85
4. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	86
5. Berdasarkan Lama Bekerja.....	87

C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden.....	87
1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Insani .....	87
2. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	92
3. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	96
D. Hasil Analisis Data.....	101
1. Uji Validitas dan Reabilitas.....	101
2. Uji Asumsi Klasik .....	105
a. Uji Normalitas.....	105
b. Uji Multikolinearitas.....	106
c. Uji Heteroskedasitas .....	107
3. Uji Hipotesis .....	109
a. Teknik Analisis Linear Berganda .....	109
b. Uji Parsial (Uji T) .....	111
c. Uji Simultan (Uji F) .....	113
4. Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	114
 <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran .....	123
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2017 .....	8
2. Nama Pegawai (Responden) BPKAD Kabupaten Pesisir Barat .....	45
3. Daftar Variabel dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian .....	50
4. Sumber Daya Pendukung BPKAD .....	83
5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	84
6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia .....	85
7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	85
8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .....	86
9. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	87
10. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator <i>Shiddiq</i> (jujur/benar) .....	88
11. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator <i>Amanah</i> (dapat dipercaya) .....	89
12. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator <i>Tabligh</i> (menyampaikan) .....	90
13. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator <i>Fatanah</i> (cerdas) .....	91
14. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah .....	93



15. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku Umum.....	94
16. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Pembuatan Laporan Keuangan Secara Periodik.....	95
17. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Relevan .....	97
18. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Andal.....	98
19. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Dapat dipahami.....	99
20. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Dapat dibandingkan.....	99
21. Uji Validitas Variabel X1 .....	101
22. Uji Validitas Variabel X2 .....	102
23. Uji Validitas Variabel Y .....	104
24. Uji Reliabilitas .....	105
25. Uji Normalitas.....	106
26. Uji Multikolinearitas.....	107
27. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	109
28. Uji T (Parsial) .....	111
29. Uji F (Simultan) .....	113
30. Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	114

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Grafik Perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat .....	10
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat .....	60
3. Uji Heteroskedasitas .....	108



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap pemaknaan judul dari istilah yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”** (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat). Maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, antara lain:

##### 1. Pengaruh

Poerwardaminta menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 849



## 2. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau tugas berdasarkan pengetahuan atau keterampilan dan didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut.<sup>3</sup>

## 3. Sumber Daya Insani (SDI)

Sumber Daya Insani (SDI) adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang menyumbangkan ide-ide mereka dan melakukan berbagai jenis pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>4</sup>

## 4. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu tindakan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan terorganisir terlebih dahulu.<sup>5</sup>

## 5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan

---

<sup>3</sup>Wibowo, *Sistem Manajemen Kinerja* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 86

<sup>4</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007), h. 25.

<sup>5</sup>Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli (On – line), tersedia di : <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581> (19 januari 2019).

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>6</sup>

#### 6. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode pelaporan, yang dapat digunakan untuk menggambarkan aktivitas dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan berkualitas tinggi adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelapor, yang harus memiliki empat karakteristik, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Lampiran I.01, Kerangka Konseptual – 10.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut :

### 1. Secara Objektif

Akhir-akhir ini dilingkungan pemerintahan daerah terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu, kurangnya kompetensi sumber daya insani khususnya bidang akuntansi sehingga menyebabkan rendahnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan kurangnya berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### 2. Secara Subjektif

- a. Banyaknya referensi yang mendukung skripsi ini, sehingga mempermudah penulis dalam mencari *literature* guna menyelesaikan skripsi ini.
- b. Penulis ingin menyesuaikan dengan fenomena apa yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.



### C. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.<sup>8</sup>

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan serangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Siklus pengelolaan keuangan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai akuntansi.

Menurut penelitian Dewi Andini dan Yusrawati, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan.<sup>9</sup> Selain sumber daya manusia, transparansi berpengaruh pada

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Lampiran I.01, Kerangka Konseptual – 10.

<sup>9</sup> Dewi Andini, Yusrawati, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi*, Vol. 24 No. 1 (Juni 2015), h. 80.

kualitas laporan keuangan (ketepatan waktu pelaporan) didorong dengan adanya regulasi.

Beberapa prinsip atau kaidah dan tehnik mengelola keuangan yang berkaitan dengan al-Qur'an atau al-Hadits antara lain Prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, Kewajiban menegakkan kebenaran, Kewajiban menegakkan keadilan dan Kewajiban menyampaikan amanah. Dalam hal ini jelas bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam mengelola keuangan secara tegas diatur dalam hukum syariah yang dinyatakan dengan dalil dan nash yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Semua hukum tersebut harus diterapkan dan dikembangkan seperti hukum-hukum lain. Seperti disebutkan di dalam Q.S An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa' : 58).<sup>10</sup>

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya sekarang ditandai dengan munculnya fenomena untuk menguatkan tuntutan akuntabilitas atas

---

<sup>10</sup> Al – Qur'an dan Terjemah Al – Aliyy (Bandung: CV Diponerogo, 2006), h. 87.

organisasi-organisasi publik. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.<sup>11</sup>

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat diartikan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Saat ini akuntabilitas atas LKPD sudah meningkat. Hal ini terlihat dari beberapa opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI yang meningkat

---

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)



setiap tahunnya. Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia dari tahun 2012 - 2017, ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perkembangan LKPD Tahun 2012-2017**

<b>LKPD</b> <b>(Tahun)</b>	<b>OPINI</b>								<b>JUMLAH</b>
	<b>WTP</b>	<b>%</b>	<b>WDP</b>	<b>%</b>	<b>TW</b>	<b>%</b>	<b>TMP</b>	<b>%</b>	
2012	72	18%	256	63%	6	1%	67	17%	401
2013	105	26%	241	61%	11	3%	41	10%	398
2014	169	44%	188	50%	4	1%	18	5%	378
2015	313	58%	194	36%	4	1%	31	5%	542
2016	375	70%	139	26%	0	0%	23	4%	537
2017	441	76%	113	21%	0	0%	18	3%	573

*Sumber: IHPS I Tahun 2018, BPK RI*

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2017 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD Tahun 2017 tersebut, BPK memberikan 411 opini WTP (76%), 113 opini WDP (21%), dan 18 opini TMP (3%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%), 298 dari 415 pemerintah kabupaten (72%), dan 80 dari 93 pemerintah kota (86%).<sup>12</sup> Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, LKPD yang

<sup>12</sup>Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2018 (On – line), tersedia di : <http://www.bpk.go.id/ihps> (10 Desember 2018)

mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 6 poin persen dari 70% pada tahun 2016 menjadi 76% pada tahun 2017, kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, andal, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga memerlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang handal. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 perubahan atas Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Oleh karena itu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Suatu keberhasilan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak hanya ditentukan pada regulasi sistem yang baik saja, tetapi Kompetensi Sumber Daya Insani mengenai pemahaman dan penguasaan teknis SAKD juga mendukung keberhasilan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Lampung dan 12 pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung kembali memperoleh opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini tersebut fokus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 lalu. Ke -12 Kabupaten/Kota peraih opini tersebut adalah Bandar Lampung, Metro, Lampung Barat, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang,

Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran, dan Way Kanan.<sup>13</sup>

Fenomena lain ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, selain itu kabupaten pesisir barat dalam hal Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah kurang maksimal dikarenakan keterbatasan pengelola keuangan yg ahli di bidang akuntansi sehingga laporan keuangannya kurang berkualitas. Dari penjelasan tersebut ini berarti Kabupaten Pesisir Barat belum mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya.

---

<sup>13</sup>Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung kembali memperoleh opini keuangan WTP (On – line), tersedia di: <http://lampung.tribunnews.com/2018/06/06/pemprov-lampung-raih-wtp-4-kali-berturut-urut> (10 Desember 2018).



Gambar 1

Grafik Perkembangan LKPD Kabupaten Pesisir Barat

Sumber: LHP LKDP, BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Berdasarkan grafik diatas, perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut:<sup>14</sup>

- LKPD Tahun 2014 – Tidak Memberi Pendapat (TMP)
- LKPD Tahun 2015 – Tidak Memberi Pendapat (TMP)
- LKPD Tahun 2016 – Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ”**

<sup>14</sup>Perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat (On – line), tersedia di: [http://www.bandarlampung.bpk.go.id/?page\\_id=7735](http://www.bandarlampung.bpk.go.id/?page_id=7735) (10 Desember 2018).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kompetensi sumber daya insani berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pesisir barat?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pesisir barat?
3. Apakah kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pesisir barat?

#### **E. Tujuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Insani terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pesisir barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pesisir barat.
- c. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pesisir barat.



## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi bagi pengemban ilmu pengetahuan khususnya ekonomi dan bisnis yang berhubungan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah kabupaten pesisir barat.

### **b. Manfaat Praktis**

#### **1) Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Akuntansi Sektor Publik.

#### **2) Bagi Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **3) Bagi Akademik**

Dapat dijadikan bahan refrensi mengenai sistem akuntansi keuangan sektor publik.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sebagai kemampuan untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Menurut Hutapea dan Thoha, ada beberapa definisi kompetensi yaitu:<sup>15</sup>

##### 1. Boyatzis

Kompetensi didefinisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu melakukan apa yang diperlukan untuk bekerja dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan”.

##### 2. Woodruffe

Membedakan antara pengertian *Competence* dan *Competency* yang mana *Competence* diartikan sebagai konsep yang terkait dengan pekerjaan, yaitu menunjukkan “area kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul”, sedangkan *Competency* merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukkan “aspek perilaku yang mendukung pencapaian prestasi unggul (*Competent*)”.

---

<sup>15</sup>Parulian Hutapea, Nurianna Thoha. *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 4

Penentuan tingkat kompetensi diperlukan untuk mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk katagori baik atau rata-rata. Penentuan ambang batas kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, seleksi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Hutapea dan Thoha, mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan prilaku individu<sup>16</sup>.

- a) Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang dimiliki karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidangnya. Pengetahuan karyawan juga menentukan keberhasilan atau kegagalan tugas yang diberikan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efektivitas perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.
- b) Keterampilan (*Skill*) merupakan upaya yang dilakukan secara baik dan optimal untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan.
- c) Sikap (*Attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Jika karyawan memiliki karakter yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang diberikan kepadanya akan dilakukan sebaik mungkin.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 28

## B. Sumber Daya Insani

Manusia dapat diartikan sebagai makhluk hidup yang berakal budi. Manusia juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau fakta, sebuah kelompok seseorang individu dalam hubungan dengan lingkungan yang merupakan suatu organisme hidup. Sumber daya Insani (SDI) adalah salah satu faktor terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.<sup>17</sup> SDI juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDI berupa manusia yang bekerja di suatu organisasi sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi.

Kompetensi menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang penting. Suatu pekerjaan harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Al-Isra' : 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (Q.S Al-Isra' : 36).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Orang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 366

<sup>18</sup> Al – Qur'an dan Terjemah Al – Aliyy..., h. 285.

Dalam bentuk perealisasi manajemen profesional, sebagaimana dijelaskan oleh Abdel Wadoed, dkk dalam tulisannya tentang manajemen sumber daya insani harus melakukan tugas-tugas sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. *Work Analysis*, yaitu sebuah analisis pekerjaan atau *job description* yang bertujuan untuk mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan dan siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan.
2. *Planning manpower*, yaitu sebuah perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan perusahaan akan jenis dan jumlah karyawan yang dibutuhkan, dan mempertimbangkan apakah dengan adanya penambahan jumlah karyawan memberi pengaruh yang baik bagi perusahaan.
3. *Choice and appointment*, merupakan sebuah tugas manajemen sumber daya insani untuk mencari karyawan, memilih yang terbaik, dan memenuhi kualifikasi mulai dari seleksi tahapan awal hingga akhir. Hal ini bertujuan untuk menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya berdasarkan atas dasar bidang ilmu yang dikuasainya.
4. *Designing wages hierarchy*, tahapan ini berfokus pada beberapa jumlah karyawan yang akan ditempatkan dalam suatu divisi atau bagian dan menentukan berapa besar jumlah gajinya dan membandingkannya dengan bagian divisi lain. Tugas ini berkaitan dengan sistem manajemen gaji yang tepat dan transparan.
5. *Designing the system of incentives*, tugas ini berkaitan dengan pemberian bonus yang dijanjikan kepada karyawan baik itu secara individu ataupun

---

<sup>19</sup>Abdel Wadoud Muoustafa Moursi El-Seoudi, *Human Resources in The Islamic Banks*, Medwell Journals, Vol. 6. No.2. 2012. h.48



kelompok yang telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik dan memuaskan.

6. *Designing system of features and services of the employee*, yaitu perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawannya seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, rumah dan kendaraan dinas.
7. *Assesing performance*, sebagian besar perusahaan melakukan penilaian terhadap karyawannya dengan berbagai cara untuk mengetahui kinerja karyawannya dan biasanya dilakukan oleh atasan mereka.
8. *Training*, bertujuan untuk meingkatkan efisiensi, kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Melalui tahapan ini, perusahaan diharapkan mampu menciptakan individu yang ahli pada bidangnya masing-masing yang telah dibuktikan dengan sertifikat keahlian khusus. Perusahaan juga dapat mengidentifikasi kebutuhan karyawan dan menentukan metode apa yang tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan karyawan.
9. *Planning the career track*, tugas ini berkaitan dengan jenjang karir karyawan, khususnya yang berkaitan dengan pangkat atau jabatan sesuai dengan kemampuan dan memenuhi persyaratan. Tugas ini harus mampu mengetahui kelemahan dan kelebihan dari setiap karyawan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi manajemen sumber daya insani diatas, tugas dan fungsi ang paling utama yaitu memilih sumber daya insani yang memiliki kualitas dan spesifikasi yang tinggi, sehingga segala sesuatu

yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian sebuah perusahaan akan berjalan dengan lancar.

### C. Kompetensi Sumber Daya Insani (SDI) dalam Islam

Kompetensi sumber daya insani dalam Islam harus berlandaskan pada sifat Nabi Muhammad SAW :<sup>20</sup>

1. *Shiddiq* yaitu benar/jujur, hendaknya dijadikan visi hidup seseorang muslim. Hal ini berimplikasi pada efektivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan keborosan/mubadzir).
2. *Amanah* dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang berarti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup seseorang muslim : bertanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas.
3. *Fathonah* yaitu cerdas, cerdik dan bijaksana, jadi hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim.
4. *Tabligh* yaitu menyampaikan. Sifat ini harus menjadi strategi hidup seseorang muslim (seseorang muslim harus komunikatif dan terbuka). Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini hendaknya dijadikan tauladan, bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul Nya pasti benar.

Relevansi nilai-nilai shidiq, amanah, fathonah dan tabligh guna mendukung pengembangan sumber daya insani di bidang Pengelolaan keuangan, menjadi sangat penting apabila kita melihat masalah yang muncul

---

<sup>20</sup>Ahda Bina, *Dahsyatnya 4 Sifat Nabi* (Surakarta: Sajada, 2013), h. 78-155.

di bidang pengelolaan keuangan disektor publik maupun swasta. Dengan demikian, baik konsepsi manajemen modern maupun nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi manajemen Islami memiliki banyak kesamaan yaitu hendaknya setiap pekerjaan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, setiap orang harus memiliki pengetahuan, profesional, dan beretika baik. Sedangkan yang membedakan Sumber Daya Insani dan Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Insani yang beriman dan bertaqwa kepada Allah dengan benar dan sungguh-sungguh melalui hati yang tunduk, patuh dan taat menjalankan agamanya dengan amal ibadah kepada Tuhannya, baik amal ibadah yang bersifat duniawi seperti bekerja keras untuk memenuhi hidupnya, membangun bangsa dan negaranya. Maupun amal yang bersifat ukhrowi seperti sholat, zakat, puasa dan haji. Taqwa juga memelihara diri yaitu memelihara diri dari amarah dan murka Allah dengan menjalankan perintah Nya.<sup>21</sup> Dengan demikian ciri ideal Sumber Daya Insani yang telah disebutkan, semuanya mencakup keimanan dan ketaqwaan, sebab dalam Islam keimanan dan ketaqwaan merupakan ciri yang paling menentukan berkualitas tidaknya sumber daya insani. Keimanan dan ketaqwaan inilah yang mengantarkan segala usaha manusia berhasil dengan baik, didunia maupun di akhirat.

---

<sup>21</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 409.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-‘Araf Ayat 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (Q.S Al – ‘Araf : 96)<sup>22</sup>

Ayat diatas menjelaskan Sumber Daya Insani yang memiliki keimanan dan ketaqwaan itu akan mendapatkan keuntungan didunia dan akhirat. Dari sini jelas bahwa keimanan dan ketaqwaan merupakan ciri ideal Sumber Daya Insani yang sangat menentukan keberhasilan bagi segala aktifitas manusia, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrowi.

#### **D. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Menurut Dr. La Midjan dan Azhar Susanto menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang berstruktur pula.<sup>23</sup> Sedangkan Alam S mendefinisikan sistem akuntansi

<sup>22</sup> Al – Qur’an dan Terjemah Al – Aliyy...., h. 163.

<sup>23</sup> Dr. La Midjan dan Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi 1 Edisi 8*, (Bandung: Lingga Jaya, 2001), h. 5

sebagai bidang akuntansi yang berspesialisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan, dalam hal ini harus menciptakan suatu cara sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen.<sup>24</sup>

Menurut Mulyadi pengertian sistem akuntansi adalah Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang memudahkan manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang dilakukan mulai dari input berupa transaksi keuangan, proses dalam bentuk analisis transaksi sebagaimana ditunjukkan dalam catatan-catatan atau jurnal, dan output berupa laporan keuangan.<sup>25</sup>

Menurut Abdul Halim Akuntansi keuangan daerah adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan melaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang digunakan sebagai informasi dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah

---

<sup>24</sup>Alam S, *Akuntansi Untuk Sekolah Menengah Atas* (Jakarta: Esis, 2004), h. 8

<sup>25</sup>Mulyadi, *Sistem Akuntansi* ...., h. 3



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, rakyat, analis dan pemerhati pemda, dan pemerintah pusat.<sup>26</sup>

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011 sebagai pembaruan dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3), yaitu : “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.<sup>27</sup>

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 sekurang-kurangnya mencakup empat prosedur yaitu:

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.

---

<sup>26</sup>Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 43

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur Akuntansi Aset Tetap meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi Akuntansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

d. **Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

**E. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

1. **Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari Permendagri No. 21 Tahun 2011 mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang digunakan sebagai pedoman penyajian informasi laporan keuangan dalam konteks pengambilan keputusan. Sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan semester dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pemimpin daerah menetapkan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.

## 2. Indikator Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini yaitu berbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.
- b. Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang berlaku Umum. Transaksi-transaksi yang terjadi dilakukan berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi. Transaksi yang terjadi juga harus disertai bukti transaksi. Pencatatan transaksi juga harus dilakukan secara kronologis. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Pembuatan Laporan Keuangan secara Periodik. Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

## F. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna<sup>30</sup>.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas laporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

---

<sup>30</sup>Paul Lillrank, "The Quality of Information", *Internasional Journal of Quality & Reliability Management* Vol. 20 No 6 (Juni 2003), h. 691 – 703.



- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder) tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas.<sup>31</sup>

Sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:<sup>32</sup>

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu:

##### a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

---

<sup>31</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviw atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

<sup>32</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Lampiran I.01, Kerangka Konseptual – 10.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.<sup>33</sup>

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### G. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen Laporan Keuangan pokok dalam Pemerintah daerah adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Laporan Realisasi Anggaran, yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atas penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional, yakni laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola

---

<sup>34</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas, yakni laporan yang menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Dewi Andini dan Yusrawati (2015) dalam penelitiannya tentang, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan” menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan.



2. Penelitian Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Penelitian oleh Devi Rovieyanti (2012) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ketika sejak awal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>35</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan kerangka pikir yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

### 1. **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya insani terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan ide. Karyawan dengan human capital tinggi lebih cenderung untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Studi yang dilakukan Dewi Andini dan Yusrawati (2015) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

---

<sup>35</sup>Prof. Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 36.

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian,  $H_0$  yaitu hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negative dan  $H_1$  yaitu hipotesis kerja yang dinyatakan dalam kalimat positif,<sup>36</sup> variabel kompetensi sumber daya insani sebagai berikut :

$H_0$  : Kompetensi sumber daya insani ( $X_1$ ) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kabupaten Pesisir Barat.

$H_1$  : Kompetensi sumber daya insani ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kabupaten Pesisir Barat.

## 2. **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli (1983) mendefinisikan

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 65

desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.

Menurut Mardiasmo “Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah”.<sup>37</sup>

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian,  $H_0$  yaitu hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negative dan  $H_1$  yaitu hipotesis kerja yang dinyatakan dalam kalimat positif,<sup>38</sup> variabel kompetensi sumber daya insani sebagai berikut :

$H_0$  : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kabupaten Pesisir Barat.

$H_2$  : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>37</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 34

<sup>38</sup> *Ibid.*

### 3. **Pengaruh kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah**

Dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan oleh sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa : “Mudah dipahami merupakan salah satu indikator kualitasnya LKPD. Mudah dipahami disini merupakan sumber daya manusia yang manghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.”

Merunut penelitian Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2017) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Maka penulis merumuskan hipotesis penelitian,  $H_0$  yaitu hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negative dan  $H_1$  yaitu hipotesis kerja yang dinyatakan dalam kalimat positif,<sup>39</sup> variabel kompetensi sumber daya insani sebagai berikut :

$H_0$  : Kompetensi sumber daya insani ( $X_1$ ) dan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ) Kabupaten Pesisir Barat.

$H_3$  : Kompetensi sumber daya insani ( $X_1$ ) dan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ) Kabupaten Pesisir Barat.

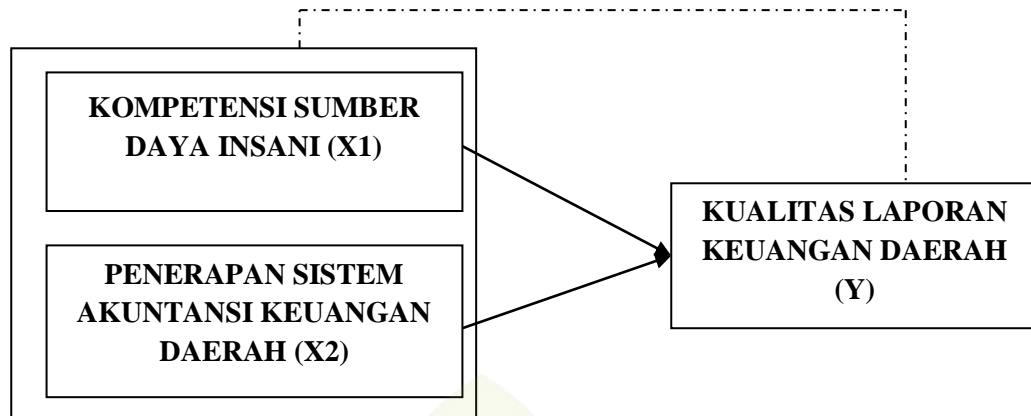
---

<sup>39</sup>*Ibid.*



## J. KERANGKA BERFIKIR

Dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

- : Secara Parsial
- - - - -→ : Secara Simultan

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaksana suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu studi yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>40</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung pada obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodelogi penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h .112.

<sup>41</sup>Prof. Sugiyono. *Metode penelitan kuantitatif kualitatif dan R&D .....*, h. 8

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>42</sup> Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimanakah mekanisme perusahaan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### B. Lokasi/Objek Penelitian

Objek dalam penelitian adalah berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas yaitu pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Objek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 29

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang atau lembaga lain sebagai pihak ketiga.<sup>43</sup> Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan responden dan Kuesioner yang dibagikan kepada karyawan Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui orang lain yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>44</sup> Beberapa sumber data sekunder diperoleh melalui cara studi dokumenter yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen organisasi, pengumpulan data-data dari internet, jurnal dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 225.

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 226.

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>45</sup> Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah 58 orang yang terdiri atas 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 39 orang tenaga kontrak.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>46</sup> Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari poplasi, suatu redaksi terhadap jumlah objek penelitian. Tujuan lain dari penentuan sampel ialah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 80

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 81.

<sup>47</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan teknik metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu.<sup>48</sup>

Adapun kriteria sampel sebagai berikut:

- a. Pegawai Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Pegawai Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat yang berkaitan dengan masalah keuangan.
- c. Pegawai Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat yang beragama islam.

Berdasarkan kriteria diatas, maka didapat sampel berjumlah 17 orang pegawai Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat.

**Tabel 2**

**Nama Pegawai (Responden) BPKAD Kabupaten Pesisir Barat**

No	Nama Pegawai	Jabatan/Status
1	Ir. Muhammad Aziz	Kepala Badan
2	Budiyono, S.Pd. SD	Kabid Perbendaharaan
3	Rochmad, S.Sos, MM	Kabid Anggaran
4	Unzir, S. Pd, MM	Kabid Akuntansi dan Aset
5	Alex Senandar, S.St. Pi	Kasubbid Belanja Pegawai
6	Gita Laksmi, SE	Kasubbid Belanja Non Pegawai
7	Dian Nursanti, S.IP	Kasubbag Keuangan

<sup>48</sup> Prof. Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.....*, h. 85.



8	Rizki Bhaskara Y, S.Kom	Kasubbid Penyusunan Anggaran
9	Riki Nopiansah, S.IP	Kasubbid Aset Daerah
10	Indah Cahyani Supasti, SE	Kasubbid Akuntansi
11	Yedi Heryanto, SE., MM	Kasubbid Pelaporan
12	Aris Puspito, S.Kom., MM	Kasubbag Umum Kepegawaian Dan Penyusunan Program
13	Fitri Yulaika, SE	Staf Subbid Belanja Non Pegawai
14	Daman Huri, SE	Staf Subbid Penyusunan Anggaran
15	Ahmad Firsada, A.Md	Staf Subbag Umum, Kepegawaian Dan Penyusunan Program
16	Pelsi Hendrawan, A.Md	Staf Subbag Umum, Kepegawaian Dan Penyusunan Program
17	Yentati, SE	Staf Subbag Umum, Kepegawaian Dan Penyusunan Program

*Sumber: Data Pegawai Negri Sipil BPKAD Kab. Pesisir Barat Tahun 2019*

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara atau interview merupakan proses guna memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>49</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat guna memperoleh informasi profil karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 137

## 2. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>50</sup> Berdasarkan kutipan ini maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode observasi disini adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data-data melalui suatu pengamatan dan juga pencatatan. Metode observasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>51</sup>

## 3. Kuesioner

Pengukuran kuesioner variabel independen (X1) yaitu Kompetensi Sumber Daya Insani, (X2) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta variabel dependen (Y) Kualitas Laporan Keuangan Daerah, pada penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel . kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.<sup>52</sup> Jawaban dari setiap item yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif hingga

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 145

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 146

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 93.

sangat negatif. Sementara untuk keperluan analisis kuantitatif diberikan skor sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 4
- b. Setuju (S) diberi skor 3
- c. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- d. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

## **F. Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel Penelitian**

### **1. Variabel Independen**

#### **a. Kompetensi Sumber Daya Insani**

Kompetensi sumber daya insani merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas nya. Kompetensi sumber daya insani dalam Islam harus berlandaskan pada sifat Nabi Muhammad SAW. Konsepsi manajemen modern maupun nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi manajemen Islami memiliki banyak kesamaan yaitu bahwa hendaknya setiap pekerjaan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala *Likert* menggunakan 25 pertanyaan. kompetensi sumber daya insani diukur dengan 4 indikator yaitu: *Shiddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh*.

b. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah menurut Pemendagri No. 21 Tahun 2011, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala *Likert* menggunakan 26 pertanyaan. Indikator variable ini yaitu : Kesesuaian sistem dengan SAP, Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum, dan Pembuatan laporan keuangan secara periodik.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan karakteristik kualitatif dari suatu laporan yang menyajikan mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta informasi lain yang merupakan hasil proses akuntansi selama periode tertentu yang akan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala *Likert*

menggunakan 11 pertanyaan. Indikator variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

**Tabel 3**  
**Daftar Variabel dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Referensi</b>	<b>Skala</b>
Kompetensi Sumber Daya Insani (X1)	Kemampuan dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. dalam Islam harus berlandaskan pada sifat Nabi Muhammad SAW.	<i>Shiddiq</i>	Ahda Bina (2013:78)	<i>Likert</i>
		<i>Amanah</i>		
		<i>Fhatonah</i>		
		<i>Tabligh</i>		
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Pemendagri No. 21 Tahun 2011, Putriasri Pujanira (2017)	<i>Likert</i>
		Prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum		
		Pembuatan laporan keuangan secara periodic		
Kualitas Laporan Keuangan	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam	Relevan	Peraturan Pemerintah Nomor 71	<i>Likert</i>
		Andal		

Daerah (Y)	informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuagozalannya	Dapat dipahami	Tahun 2010	
		Dapat dibandingkan		

## G. Metode Analisis Data

### 1. Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.

Menurut Imam Ghozali uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.<sup>53</sup> Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai  $r_{hitung}$  lebih besar atau sama dengan  $r_{tabel}$ . Untuk menentukan nilai  $r_{hitung}$ , dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai *Coorrected Item-Total Correlation*. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka kuisisoner valid.
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka kuesioner tidak valid.

### 2. Uji Reliabilitas

<sup>53</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 39



Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner).

Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika nilai *Cronbach Alpha* pada kuisisioner  $> 0,6$  maka variabel tersebut dinyatakan reliable.<sup>54</sup>

## H. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yang bersangkutan.

Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji *Kolmogorof-Smirnov* (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S  $>$  dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 45

pola penyebaran P-Plot dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.<sup>55</sup>

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika  $VIF > 10$  dan nilai tolerance  $< 0,10$  maka terjadi gejala Multikolinieritas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji Glesjer. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 67

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 69

## I. Uji Hipotesis

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Model pengujian menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hal ini akan menunjukkan hubungan (korelasi) antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya. Karena terdapat lebih dari dua variabel, maka hubungan linier dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier berganda. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya insani (X1) dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

Rumus :  $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$

Keterangan :

Y = Kualitas laporan keuangan

a = Konstanta

b (1,2) = Koefisien regresi masing-masing X

X1 = Kompetensi sumber daya insani

X2 = Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

### 2. Uji Statistik T (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk menguji secara individual pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).<sup>57</sup>

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : “Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen), Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima (variable independen berpengaruh terhadap variable dependen)”.

### 3. Uji Statistik F (Pengujian Secara Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji statistik-F. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\text{Sig} \leq 5\%$ ), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\text{Sig} > 5\%$ ), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.<sup>58</sup>

## J. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi /  $R^2$  digunakan untuk mengetahui hubungan antara semua variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Koefisien

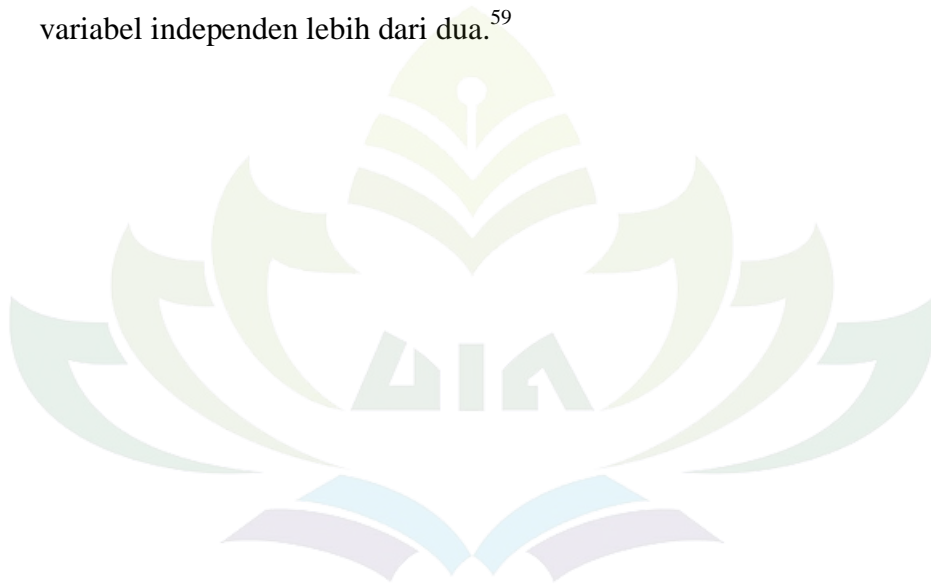
---

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 95

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 102

determinasi menunjukkan seberapa besar persentasi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen.

Nilai  $R^2$  terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu), jika  $R^2$  semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan *Adjusted R Square*, hal ini dikarenakan jumlah variabel independen lebih dari dua.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 145

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Latar Belakang Berdiri BPKAD Kabupaten Pesisir Barat

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai dari pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, melalui atasan masing-masing. Kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.<sup>60</sup>

Sedangkan disisi lain, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan tuntutan masyarakat. Berbagai tuntutan yang pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

---

<sup>60</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat, h. 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang pola penyelenggara pemerintah yang bergeser dari paradigma sentralisasi ke desentralisasi dengan diberikannya hak otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Begitu juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, telah menempatkan strategi penyelenggara Pemerintah Daerah Melalui Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam Manajemen Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Otonomi Daerah terpola sebagai suatu kewajiban Daerah terhadap Pemerintah dari hak-hak Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sedangkan Manajemen Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah mengandung unsur-unsur hak-hak Daerah untuk kepentingan rakyat yang tidak terlalu mengedepankan kewajiban daerah.<sup>61</sup>

Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menggambarkan dalam azas desentralisasi, bahwa Daerah mendapat wewenang dari Pemerintah untuk berotonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana provinsi tidak memiliki hubungan hierarkis dengan

---

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 2



kabupaterr/kota dan kabupaten/kota bukan perangkat pusat, akan tetapi sebagai perangkat daerah.

## 2. Struktur Organisasi BPKAD

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat, terdiri dari:<sup>62</sup>

- a. Kepala Badan dipimpin oleh Ir. Muhammad Aziz;
- b. Sekretaris dipimpin oleh I Nyoman Setiawan, SE., MM;
  - Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Dian Nursanti, S. IP;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Aris Puspito, S.Kom., MM;
- c. Bidang Anggaran dipimpin oleh Rochmad, S.Sos, MM;
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh Rizki Bhaskara Y, S.Kom;
  - 2) Sub Bidang Pembinaan Anggaran dipimpin oleh Kadek Nupi, SH., MM;
- d. Bidang Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Budiyono, S.Pd. SD;
  - 1) Sub Bidang Belanja Pegawai dipimpin oleh Alex Senandar, SSt.Pi;
  - 2) Sub Bidang Belanja Non Pegawai dipimpin oleh Gita Laksmi, SE;
- e. Bidang Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh Unzir, S.Pd, MM;
  - 1) Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh Yedi Heryanto, SE., MM;
  - 2) Sub Bidang Akuntansi dipimpin oleh Indah Cahyaning Supasti, SE;
  - 3) Sub Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Riki Nopiansyah, S.IP
- f. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)

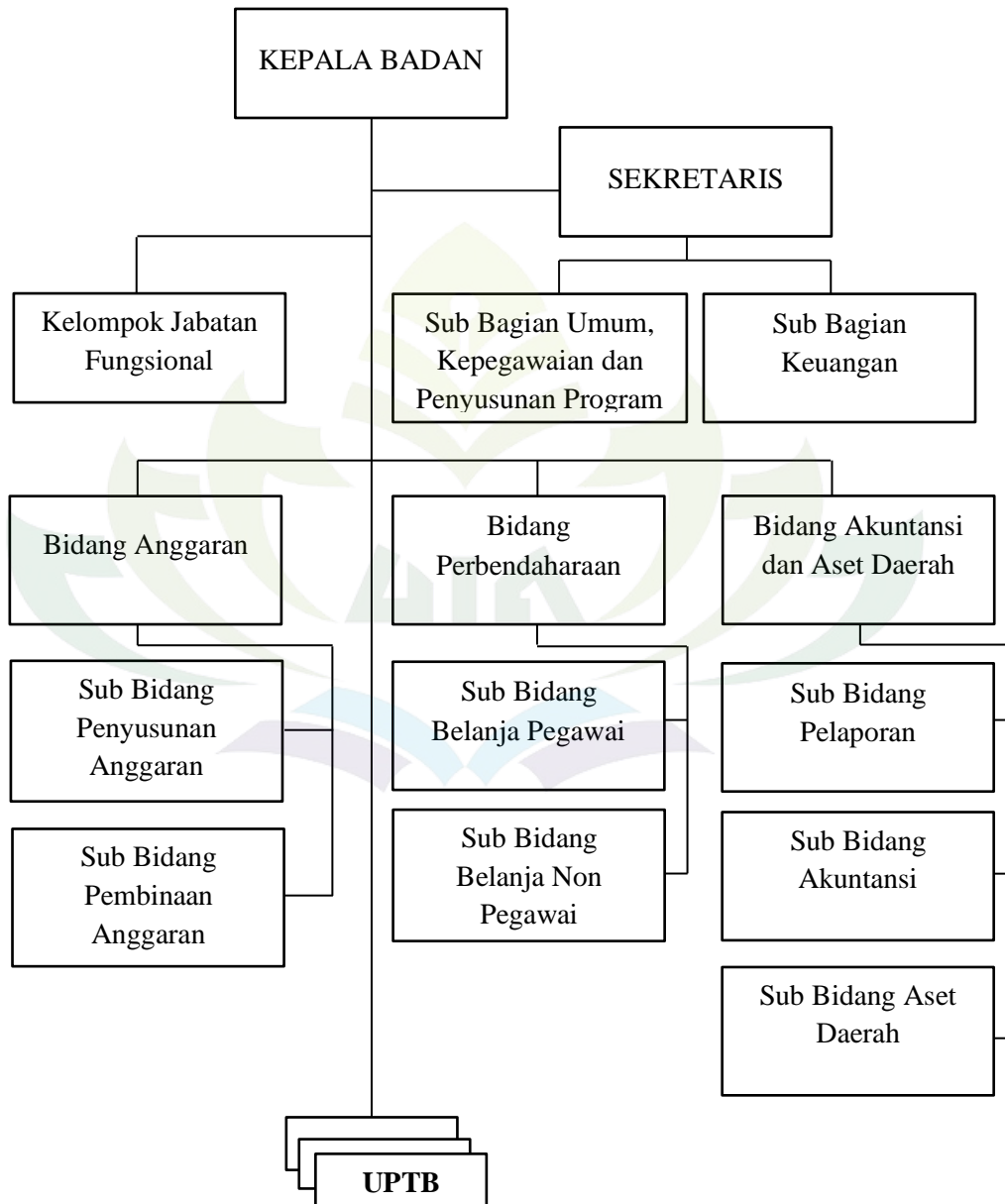
---

<sup>62</sup>Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat, h. 2

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam tampilan berikut:<sup>63</sup>

**Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kab. Pesisir Barat**



<sup>63</sup>*Ibid*, h. 3

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
  - 1) perumusan kebijakan teknis di pengelola keuangan dan aset daerah;
  - 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
  - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
  - 4) pelayanan administrasi; dan
  - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melakukan penyusunan program,

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 4

evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :<sup>65</sup>

- 1) pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- 2) pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- 3) pelayanan administrasi;
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup sekretariat dan di lingkup badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- 5) penilaian terhadap prestasi kerja bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat, terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum, surat-menyurat, kearsipan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan guna menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 5

kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas. Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyusunan Program adalah :<sup>66</sup>

- (a) Menyusun rencana dan program kerja lingkup dinas.
- (b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
- (c) Mengolah, menyusun dan menyajikan data sebagai bahan informasi;
- (d) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di lingkup sekretariat dan di lingkup badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (e) Melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
- (f) Menyimpan, mendokumentasikan dan merawat seluruh tata naskah dan arsip surat menyurat untuk kepentingan dinas;
- (g) Memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- (h) Melaksanakan urusan rumah tangga dan keuangan serta peraturan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;

---

<sup>66</sup>*Ibid*, h. 6

- (i) Melaksanakan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran tugas;<sup>67</sup>
- (j) Melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (k) Menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (l) Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan untuk atasan guna mencari pemecahan masalah;
- (m) Mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengolah data untuk disampaikan kepada atasan sebagai saran dan bahan masukan;
- (n) Mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara khusus dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara umum;
- (o) Menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan, dekonsentrasi dan lain-lain)

---

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 7

dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disertai dengan penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat administrasi lainnya;

- (p) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- (q) Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
- (r) Memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan, mengadakan, monitoring dan evaluasi serta menghimpun dan menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;
- (s) Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (t) Melaksanakan perencanaan program pembangunan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (u) Melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (v) Menyusun rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan;



- (w) Mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada atasan;<sup>68</sup>
  - (x) Menyusun rencana anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
  - (y) Menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan program dinas;
  - (z) Menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
  - (aa) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - (bb) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melaksanakan dan mengoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan,

---

<sup>68</sup>*Ibid*, h. 8

pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- (a) Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang keuangan sebagai pedoman kerja;
- (b) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- (c) Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK);
- (d) Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- (e) Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- (f) Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (g) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

---

<sup>69</sup>*Ibid*, h. 9

- (h) Melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD);
  - (i) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD);
  - (j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
  - (k) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - (l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan pembinaan anggaran terhadap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :<sup>70</sup>
- 1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;

---

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 10

- 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
- 3) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang anggaran;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang anggaran;
- 5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Anggaran, terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD). Rincian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan dalam rangka mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang

berhubungan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- Menyiapkan bahan dalam rangka menerima dan mengolah rancangan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD);<sup>71</sup>
- Melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Menyiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- Menyusun pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran dan menyiapkan bahan pemecahan masalah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penyusunan Anggaran, berdasarkan hasil kerja yang telah

---

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 11

dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Sub Bidang Pembinaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melakukan dan mengoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah. Rincian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- (a) Menyiapkan bahan guna melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- (b) Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- (c) Menyiapkan bahan guna menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;

---

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 12

- (e) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pembinaan Anggaran, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan guna menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan daerah baik belanja pegawai maupun belanja non pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
- 1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
  - 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
  - 3) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan;
  - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan; dan
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja pegawai. Rincian tugas Sub Bidang Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>
  - (a) Menyiapkan bahan guna mengumpulkan dan menghimpun data serta informasi yang berkaitan dengan belanja pegawai baik gaji maupun tunjangan;
  - (b) Menyiapkan bahan guna menyusun Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja pegawai
  - (c) Menyiapkan bahan guna menyusun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja pegawai;
  - (d) Menyiapkan bahan dalam rangka membuat kartu kendali Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja pegawai;
  - (e) Menyiapkan bahan guna mengelola kartu gaji dan menyusun laporan gaji pegawai;
  - (f) Menyiapkan bahan guna melakukan pengujian secara seksama terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) belanja pegawai dan meneliti kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan belanja pegawai;

---

<sup>73</sup>*Ibid*, h. 13

- (g) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang belanja pegawai;
- (h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- (i) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Belanja Pegawai, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- (j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Sub Bidang Belanja Non Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja non pegawai. Rincian tugas Sub Bidang Belanja Non Pegawai adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- (a) Menyiapkan bahan guna mengumpulkan dan menghimpun data serta informasi yang berkaitan dengan belanja non pegawai baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;

---

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 14

- (b) Menyiapkan bahan guna menyusun Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja non pegawai;
- (c) Menyiapkan bahan guna menyusun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja non pegawai;
- (d) Menyiapkan bahan guna membuat kartu kendali Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja non pegawai;
- (e) Menyiapkan bahan guna melakukan pengujian secara seksama terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) belanja non pegawai dan meneliti kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan belanja non pegawai;
- (f) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang belanja non pegawai;
- (g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- (h) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Belanja Non Pegawai, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan

- (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang Akuntansi dan pengelolaan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai fungsi:<sup>75</sup>
- 1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Akuntansi dan Aset Daerah;
  - 2) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Aset Daerah;
  - 3) Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang Akuntansi dan Aset Daerah;
  - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Akuntansi dan Aset Daerah; dan
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melakukan kegiatan pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah.

---

<sup>75</sup>*Ibid*, h. 15

Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pelaporan adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- (a) Menyiapkan bahan guna mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sub bidang pelaporan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
- (b) Menyiapkan bahan guna menguji dengan seksama laporan keuangan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD);
- (c) Menyiapkan bahan guna menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode tertentu;
- (d) Menyiapkan bahan guna membukukan/mencatat pendapatan dan belanja daerah;
- (e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- (f) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pelaporan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan

---

<sup>76</sup>*Ibid*, h. 17

(g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melakukan kegiatan pembukuan dan penghitungan pendapatan dan belanja daerah, serta melakukan fungsi akuntansi pemerintah daerah. Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- (a) Menyiapkan bahan guna mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sub bidang akuntansi baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
- (b) Menyiapkan bahan guna menyusun laporan keuangan daerah dan neraca pemerintah daerah;
- (c) Menyiapkan bahan guna melaksanakan akuntansi keuangan daerah pada tiap tahun anggaran;
- (d) Menyiapkan bahan guna menyusun laporan keuangan daerah;
- (e) Menyiapkan bahan guna mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan;
- (f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;

---

<sup>77</sup>*Ibid*, h. 18

- (g) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Akuntansi, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
  - (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Sub Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan guna melaksanakan pengkajian dan analisa kebutuhan, inventarisasi dan verifikasi aktiva tetap, properti serta sarana dan prasarana serta menyiapkan bahan guna melaksanakan pengendalian aktiva tetap, properti, serta sarana dan prasarana yang menjadi kepemilikan daerah. Rincian tugas Sub Bidang Aset Daerah adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>
- (a) Menyiapkan bahan guna membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
  - (b) Menyiapkan bahan guna menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan dan pedoman teknis yang berhubungan dengan kekayaan daerah;
  - (c) Menyiapkan bahan guna melaksanakan penyusunan rencana aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana daerah;

---

<sup>78</sup>*Ibid*, h. 19



- (d) Menyiapkan bahan guna melaksanakan penerimaan semua hasil pengadaan barang daerah;
- (e) Menyiapkan bahan guna melaksanakan inventarisasi dan pengadaan aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana daerah;
- (f) Menyiapkan bahan guna melakukan sensus barang daerah;
- (g) Menyiapkan bahan guna melakukan pemeriksaan barang daerah;
- (h) Menyiapkan bahan guna melakukan penyusunan standar harga barang;
- (i) Menyiapkan bahan guna melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan aktiva tetap, properti sarana dan prasarana serta melakukan pengendalian kepemilikan daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (j) Menyiapkan bahan guna mengelola administrasi penghapusan;<sup>79</sup>
- (k) Menyiapkan bahan guna melakukan perencanaan pelelangan, penjualan, sumbangan/hibah kepada pihak lain dan pemusnahan barang daerah;
- (l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;

---

<sup>79</sup>*Ibid*, h. 20

- (m) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Aset Daerah, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- (n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Visi dan Misi BPKAD

#### a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, jauh kearah mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Dengan mempertimbangkan inisiasi-inisiasi, idealisme, informasi identifikasi, insepse yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang serta memperhatikan keinginan stake holders, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional".<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Laporan Akuntabilitas Kinerja Intsansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan....., h. 3

Visi diatas dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi SKPD. Dengan pernyataan misi yang jelas diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

**b. Misi**

Misi merupakan pokok-pokok kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan tujuan, sasaran dan strategi. Dengan kata lain, misi merupakan tujuan utama kearah mana tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah ingin dicapai. Adapun misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Meningkatkan pengelolaan aset daerah.

**4. Sumber Daya Pendukung**

Sumber daya manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 19 orang, dan Pegawai Kontrak dan Pegawai Honorer Tenaga

Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 39 orang dengan rincian sebagai berikut.<sup>81</sup>

**Tabel 4**  
**Sumber Daya Pendukung BPKAD**

<b>Data Pegawai Berdasarkan Jabatan</b>		
<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	3 Orang
4	Kasubbag/Kasubbid	9 Orang
5	Jabatan Fungsional	-
6	Staf	5 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>19 Orang</b>
<b>Data Pegawai Berdasarkan Golongan</b>		
<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Golongan IV	4 Orang
2	Golongan III	13 Orang
3	Golongan II	2 Orang
4	Golongan I	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>19 Orang</b>
<b>Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan</b>		
<b>No</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>
1	S-2	6 Orang
2	S-1	10 Orang
3	D-III	2 Orang
4	SLTA	1 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>19 Orang</b>

*Sumber: LAKIP Tahun Anggaran 2018 BPKAD Kab. Pesisir Barat*

---

<sup>81</sup>*Ibid*, h. 6

## B. Gambaran Umum Responden

Pada bagian ini diuraikan dan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diolah untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Pesisir Barat. Penulis menyebar kuesioner sebanyak 17, dimana responden merupakan pegawai BPKAD yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan dan beragama islam. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: menurut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Adapun rinciannya sebagai berikut:

### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 5**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki - Laki	12	71%
2	Perempuan	5	29%
	Total	17	100%

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 17 responden terlihat bahwa 12 responden berjenis kelamin laki – laki (71%), sedangkan 5 responden berjenis kelamin perempuan (29%).

## 2. Berdasarkan Usia

**Tabel 6**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	23 – 40 Tahun	12	71%
2	41 – 58 Tahun	5	29%
	Total	17	100%

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 17 responden terlihat bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara 23-40 tahun yaitu sebanyak 12 orang (71%), sedangkan usia 41-58 tahun sebanyak 5 orang (29%).

## 3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 7**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMA	-	-
2	Diploma	2	12%
3	Sarjana	11	65%
4	Magister	4	23%
5	Lainnya	-	-
	Total	17	100%

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 17 responden terlihat bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan terakhir Sarjana yaitu sebanyak 11 orang (65%). Responden dengan pendidikan terakhir Diploma sebanyak 2 orang (12%) dan pendidikan terakhir Magister sebanyak 4 orang (23%).

#### 4. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

**Tabel 8**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Akuntansi	2	12%
2	Ekonomi	4	23%
3	Komunikasi	3	17%
4	Teknik (insinyur)	1	6%
5	Ilmu Pemerintahan	2	12%
6	Keguruan	2	12%
7	Ahli Madya	2	12%
8	Saint Terapan Perikanan (STP)	1	6%
	Total	17	100%

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 17 responden terlihat bahwa responden dalam penelitian ini yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 2 orang (12%), Ekonomi 4 orang (23%), Komunikasi 3 orang (17%), Teknik 1 orang (6%), Ilmu Pemerintahan 2 orang (12%), Keguruan 2 orang (12%), Ahli Madya 2 orang (12%), dan STP 1 orang (6%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang latar belakang pendidikan dibidang Akuntansi hanya 12%.



## 5. Berdasarkan Lama Bekerja

**Tabel 9**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	1 – 5 Tahun	12	71%
2	6 – 10 Tahun	5	29%
3	> 10 Tahun	-	-
	Total	17	100%

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui dari 17 responden terlihat bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 12 orang (71%), sedangkan responden dengan lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 5 orang (29%).

## C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden

### 1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Insani (X1)

Kompetensi Sumber Daya Insani dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Data variabel Kompetensi Sumber Daya Insani diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 17 responden. Dalam Variabel Kompetensi Sumber Daya Insani terdapat 4 indikator yaitu: *Shiddiq* (jujur/benar), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan), dan *Fatanah* (cerdas) yang dijabarkan dalam 25 pernyataan.

Berikut ini adalah hasil kuesioner yang telah peneliti lakukan untuk mengukur Kompetensi Sumber Daya Insani pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan 4 indikator diatas:

a. Indikator *Shiddiq* (jujur/benar)

Distribusi jawaban responden mengenai Kompetensi Sumber Daya Insani berdasarkan Indikator *Shiddiq* (jujur/benar) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator *Shiddiq***  
**(jujur/benar)**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X <sub>1.1</sub>	16	94	1	6	-	-	-	-	17	100
2	X <sub>1.2</sub>	2	12	14	82	1	6	-	-	17	100
3	X <sub>1.3</sub>	4	23	11	65	2	12	-	-	17	100
4	X <sub>1.4</sub>	5	29,4	6	35,3	6	35,3	-	-	17	100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>1.1</sub> yaitu pegawai mengetahui kewajiban sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS), responden dengan persentase 94% menjawab sangat setuju dan 6% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Insani di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan indikator *Shiddiq* (jujur/benar) .

b. Indikator *Amanah* (dapat dipercaya)

Distribusi jawaban responden mengenai Kompetensi Sumber Daya Insani berdasarkan Indikator *Amanah* (dapat dipercaya) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator *Amanah***  
**(dapat dipercaya)**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X <sub>1.5</sub>	6	35	11	65	-	-	-	-	17	100
2	X <sub>1.6</sub>	1	6	15	88	1	6	-	-	17	100
3	X <sub>1.7</sub>	11	65	6	35	-	-	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>1.7</sub> yaitu pegawai bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada, responden dengan persentase 65% menjawab sangat setuju dan 35% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Insani di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai berdasarkan indikator *Amanah* (dapat dipercaya).

c. Indikator *Tabligh* (menyampaikan)

Distribusi jawaban responden mengenai Kompetensi Sumber Daya Insani berdasarkan Indikator *Tabligh* (menyampaikan) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator *Tabligh***  
**(menyampaikan)**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X <sub>1.8</sub>	4	24	13	76	-	-	-	-	17	100
2	X <sub>1.9</sub>	1	6	16	94	-	-	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>1.8</sub> yaitu Jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah, pegawai pada bagian keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi atau diklat, responden dengan persentase 24% menjawab sangat setuju dan 76% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Insani di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai berdasarkan indikator *Tabligh* (menyampaikan). Yang berarti Jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah, pegawai pada bagian keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi atau diklat sudah dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat.

d. Indikator *Fatanah* (cerdas)

Distribusi jawaban responden mengenai Kompetensi Sumber Daya Insani berdasarkan Indikator *Fatanah* (cerdas) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator *Fatanah* (cerdas)**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X <sub>1.10</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100
2	X <sub>1.11</sub>	8	47	7	41	2	12	-	-	17	100
3	X <sub>1.12</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100
4	X <sub>1.13</sub>	7	41	9	53	1	6	-	-	17	100
5	X <sub>1.14</sub>	6	35	10	59	1	6	-	-	17	100
6	X <sub>1.15</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100
7	X <sub>1.16</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100
8	X <sub>1.17</sub>	17	100	-	-	-	-	-	-	17	100
9	X <sub>1.18</sub>	10	59	7	41	-	-	-	-	17	100
10	X <sub>1.19</sub>	17	100	-	-	-	-	-	-	17	100
11	X <sub>1.20</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100
12	X <sub>1.21</sub>	6	35	10	59	1	6	-	-	17	100
13	X <sub>1.22</sub>	6	35	9	53	2	12	-	-	17	100
14	X <sub>1.23</sub>	6	35	9	53	2	12	-	-	17	100
15	X <sub>1.24</sub>	5	29,5	11	64,5	1	6	-	-	17	100
16	X <sub>1.25</sub>	5	29,5	5	29,5	7	41	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>1.17</sub> dan item X<sub>1.18</sub>.

item X<sub>1.17</sub> yaitu Basis akuntansi penyusunan laporan keuangan PP No 71 tahun 2010 berbasis akrual, responden dengan persentase 100% menjawab sangat setuju. Sedangkan item X<sub>1.18</sub> yaitu Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi/entitas. Responden dengan persentase 100% menjawab sangat setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Insani di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai berdasarkan indikator *Fatanah* (cerdas). Yang artinya pengetahuan para pegawai tentang Akuntansi dan Basis akuntansi penyusunan laporan keuangan sudah memenuhi indikator *Fatanah* (cerdas).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Insani di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat dengan tanggapan responden terhadap indikator – indikator tersebut tergolong berkompeten yang ditunjukkan dengan mayoritas jawaban responden sebagian besar menjawab sangat setuju dan setuju.

## **2. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)**

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Data variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 17 responden. Dalam Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdapat 3 indikator yaitu: Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan

Standar Pencatatan yang Berlaku Umum, dan Pembuatan Laporan Keuangan Secara Periodik yang dijabarkan dalam 26 pernyataan.

Berikut ini adalah hasil kuesioner yang telah peneliti lakukan untuk mengukur Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan 3 indikator diatas:

a. Indikator Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Distribusi jawaban responden mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Indikator Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 14**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator**  
**Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X <sub>2.1</sub>	17	100	-	-	-	-	-	-	17	100
2	X <sub>2.2</sub>	6	35	11	65	-	-	-	-	17	100
3	X <sub>2.3</sub>	4	23,5	13	76,5	-	-	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>2.1</sub> yaitu Sistem akuntansi yang diterapkan pada dinas ini sesuai SAP, responden dengan persentase 100% menjawab sangat setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah



di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Indikator Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah sudah sesuai.

- b. Indikator Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku Umum

Distribusi jawaban responden mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Indikator Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 15**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku Umum**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X <sub>2.4</sub>	2	12	15	88	-	-	-	-	17	100
2	X <sub>2.5</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100
3	X <sub>2.6</sub>	4	23,5	12	70,5	1	6	-	-	17	100
4	X <sub>2.7</sub>	5	29,5	12	70,5	-	-	-	-	17	100
5	X <sub>2.8</sub>	6	35	10	59	1	6	-	-	17	100
6	X <sub>2.9</sub>	4	23,5	6	35,5	7	41	-	-	17	100
7	X <sub>2.10</sub>	5	29,5	12	70,5	-	-	-	-	17	100
8	X <sub>2.11</sub>	8	47	9	53	-	-	-	-	17	100
9	X <sub>2.12</sub>	10	59	7	41	-	-	-	-	17	100
10	X <sub>2.13</sub>	11	65	6	35	-	-	-	-	17	100
11	X <sub>2.14</sub>	-	-	-	-	17	100	-	-	17	100
12	X <sub>2.15</sub>	4	23,5	13	76,5	-	-	-	-	17	100
13	X <sub>2.16</sub>	2	12	13	76	2	12	-	-	17	100
14	X <sub>2.17</sub>	6	35	10	59	1	6	-	-	17	100
15	X <sub>2.18</sub>	8	47	9	53	-	-	-	-	17	100
16	X <sub>2.19</sub>	8	47	9	53	-	-	-	-	17	100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>2.13</sub> yaitu Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara kronologis, responden dengan persentase 65% menjawab sangat setuju dan 35% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Indikator Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku Umum sudah sesuai.

c. Indikator Pembuatan Laporan Keuangan Secara Periodik

Distribusi jawaban responden mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Indikator Pembuatan Laporan Keuangan Secara Periodik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 16**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator**  
**Pembuatan Laporan Keuangan Secara Periodik**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X <sub>2.20</sub>	4	23	11	65	2	12	-	-	17	100
2	X <sub>2.21</sub>	5	29	12	71	-	-	-	-	17	100
3	X <sub>2.22</sub>	6	35	11	65	-	-	-	-	17	100
4	X <sub>2.23</sub>	8	47	7	41	2	12	-	-	17	100
5	X <sub>2.24</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100
6	X <sub>2.25</sub>	6	35	10	59	1	6	-	-	17	100
7	X <sub>2.26</sub>	10	59	7	41	-	-	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil

terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>2</sub>26 yaitu Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik, responden dengan persentase 59% menjawab sangat setuju dan 41% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Indikator Pembuatan Laporan Keuangan Secara Periodik sudah sesuai.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat dengan tanggapan responden terhadap indikator – indikator tersebut sudah melakukan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan mayoritas jawaban responden sebagian besar menjawab sangat setuju dan setuju.

### **3. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)**

Kualitas Laporan Keuangan Daerah dalam penelitian ini merupakan variabel dependen. Data variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 17 responden. Dalam Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah terdapat 4 indikator yaitu: Relevan, Andal, Dapat dipercaya, dan Dapat dibandingkan yang dijabarkan dalam 11 pernyataan.

Berikut ini adalah hasil kuesioner yang telah peneliti lakukan untuk mengukur Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan 4 indikator diatas:

a. Indikator Relevan

Distribusi jawaban responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Indikator Relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 17**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Relevan**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Y <sub>1.1</sub>	11	65	6	35	-	-	-	-	17	100
2	Y <sub>1.2</sub>	14	82	3	18	-	-	-	-	17	100
3	Y <sub>1.3</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100
4	Y <sub>1.4</sub>	9	53	7	41	1	6	-	-	17	100
5	Y <sub>1.5</sub>	5	29	8	47	4	24	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item Y<sub>1.2</sub> yaitu Informasi laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), responden dengan persentase 82% menjawab sangat setuju dan 18% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Indikator Relevan sudah sesuai karena di kantor BPKAD Kabupaten Pesisir barat sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b. Indikator Andal

Distribusi jawaban responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Indikator Andal dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Andal**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Y <sub>1.6</sub>	5	29	12	71	-	-	-	-	17	100
2	Y <sub>1.7</sub>	3	18	13	76	1	6	-	-	17	100
3	Y <sub>1.8</sub>	7	41	10	59	-	-	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item Y<sub>1.8</sub> yaitu Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, responden dengan persentase 41% menjawab sangat setuju dan 59% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Indikator Andal sudah sesuai, yang ditandai dengan Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan sudah memenuhi kebutuhan penggunanya.

c. Indikator Dapat dipahami

Distribusi jawaban responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Indikator Dapat dipahami dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 19**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Dapat dipahami**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Y <sub>1.9</sub>	6	35	11	65	-	-	-	-	17	100
2	Y <sub>1.10</sub>	8	47	9	53	-	-	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item Y<sub>1.10</sub> yaitu Laporan keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti, responden dengan persentase 47% menjawab sangat setuju dan 53% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai berdasarkan Indikator Dapat dipahami.

d. Indikator Dapat dibandingkan

Distribusi jawaban responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Indikator Dapat dibandingkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 20**  
**Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Dapat dibandingkan**

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Y <sub>1.11</sub>	12	71	5	29	-	-	-	-	17	100

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju. Dimana pada item Y<sub>1.11</sub> yaitu Informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, responden dengan persentase 71% menjawab sangat setuju dan 29% menjawab setuju. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai berdasarkan Indikator Dapat dibandingkan.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Pesisir Barat dengan tanggapan responden terhadap indikator – indikator tersebut sudah sesuai dengan indikator yang ditunjukkan dengan mayoritas jawaban responden sebagian besar menjawab sangat setuju dan setuju.



## D. Hasil Analisis Data

### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### a. Uji Validitas

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur dari variabel yang hendak diteliti. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan nilai  $r_{tabel}$ . Teknik yang digunakan untuk uji validitas ini adalah “*korelasi product moment*” dari Pearson dengan signifikansi 5% (tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 0.05$ ).

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 18. Adapun hasil *output* perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 21**  
**Uji Validitas Variabel X1 (Kompetensi Sumber Daya Insani)**

No	Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	X <sub>1.1</sub>	0,188	0,482	Tidak Valid
2	X <sub>1.2</sub>	0,428	0,482	Tidak Valid
3	X <sub>1.3</sub>	0,825	0,482	Valid
4	X <sub>1.4</sub>	0,730	0,482	Valid
5	X <sub>1.5</sub>	0,911	0,482	Valid
6	X <sub>1.6</sub>	0,476	0,482	Tidak Valid
7	X <sub>1.7</sub>	0,508	0,482	Valid
8	X <sub>1.8</sub>	0,514	0,482	Valid
9	X <sub>1.9</sub>	0,201	0,482	Tidak Valid
10	X <sub>1.10</sub>	0,606	0,482	Valid
11	X <sub>1.11</sub>	0,823	0,482	Valid

12	X <sub>1.12</sub>	0,726	0,482	Valid
13	X <sub>1.13</sub>	0,849	0,482	Valid
14	X <sub>1.14</sub>	0,804	0,482	Valid
15	X <sub>1.15</sub>	0,752	0,482	Valid
16	X <sub>1.16</sub>	0,912	0,482	Valid
17	X <sub>1.17</sub>	0,712	0,482	Valid
18	X <sub>1.18</sub>	0,709	0,482	Valid
19	X <sub>1.19</sub>	0,709	0,482	Valid
20	X <sub>1.20</sub>	0,709	0,482	Valid
21	X <sub>1.21</sub>	0,709	0,482	Valid
22	X <sub>1.22</sub>	0,872	0,482	Valid
23	X <sub>1.23</sub>	0,821	0,482	Valid
24	X <sub>1.24</sub>	0,802	0,482	Valid
25	X <sub>1.25</sub>	0,923	0,482	Valid

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar item pernyataan pada Kompetensi Sumber Daya Insani dinyatakan valid hanya sebagian yang tidak valid. Maka, pernyataan yang tidak valid akan di drop. Drop disini maksudnya yaitu membuang item – item pernyataan yang tidak valid setelah melakukan pengujian atau dengan kata lain tidak mengikutkan nilai item pernyataan yang tidak valid pada perhitungan selanjutnya.

**Tabel 22**

**Uji Validitas Variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)**

No	Pernyataan	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	X <sub>2.1</sub>	0,623	0,482	Valid
2	X <sub>2.2</sub>	0,206	0,482	Tidak Valid

3	X <sub>2.3</sub>	0,541	0,482	Valid
4	X <sub>2.4</sub>	0,570	0,482	Valid
5	X <sub>2.5</sub>	0,784	0,482	Valid
6	X <sub>2.6</sub>	0,829	0,482	Valid
7	X <sub>2.7</sub>	0,747	0,482	Valid
8	X <sub>2.8</sub>	0,637	0,482	Valid
9	X <sub>2.9</sub>	0,542	0,482	Valid
10	X <sub>2.10</sub>	0,697	0,482	Valid
11	X <sub>2.11</sub>	0,335	0,482	Tidak Valid
12	X <sub>2.12</sub>	0,713	0,482	Valid
13	X <sub>2.13</sub>	0,694	0,482	Valid
14	X <sub>2.14</sub>	0,675	0,482	Valid
15	X <sub>2.15</sub>	0,848	0,482	Valid
16	X <sub>2.16</sub>	0,712	0,482	Valid
17	X <sub>2.17</sub>	0,853	0,482	Valid
18	X <sub>2.18</sub>	0,336	0,482	Tidak Valid
19	X <sub>2.19</sub>	0,765	0,482	Valid
20	X <sub>2.20</sub>	0,421	0,482	Tidak Valid
21	X <sub>2.21</sub>	0,596	0,482	Valid
22	X <sub>2.22</sub>	0,495	0,482	Valid
23	X <sub>2.23</sub>	0,629	0,482	Valid
24	X <sub>2.24</sub>	0,691	0,482	Valid
25	X <sub>2.25</sub>	0,839	0,482	Valid
25	X <sub>2.26</sub>	0,573	0,482	Valid

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar item pernyataan pada Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dinyatakan valid hanya sebagian yang tidak valid. Maka, pernyataan yang tidak valid akan di drop. Drop disini maksudnya yaitu membuang item – item pernyataan yang tidak valid setelah melakukan pengujian atau dengan

kata lain tidak mengikuti nilai item pernyataan yang tidak valid pada perhitungan selanjutnya.

**Tabel 23**  
**Uji Validitas Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah)**

No	Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	Y <sub>2.1</sub>	0,399	0,482	Tidak Valid
2	Y <sub>2.2</sub>	0,439	0,482	Tidak Valid
3	Y <sub>2.3</sub>	390	0,482	Tidak Valid
4	Y <sub>2.4</sub>	0,711	0,482	Valid
5	Y <sub>2.5</sub>	0,577	0,482	Valid
6	Y <sub>2.6</sub>	0,877	0,482	Valid
7	Y <sub>2.7</sub>	0,707	0,482	Valid
8	Y <sub>2.8</sub>	0,793	0,482	Valid
9	Y <sub>2.9</sub>	0,506	0,482	Valid
10	Y <sub>2.10</sub>	0,610	0,482	Valid
11	Y <sub>2.11</sub>	0,428	0,482	Tidak Valid

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar item pernyataan pada Penerapan Kualitas Laporan Keuangan Daerah dinyatakan valid hanya sebagian yang tidak valid. Maka, pernyataan yang tidak valid akan di drop. Drop disini maksudnya yaitu membuang item – item pernyataan yang tidak valid setelah melakukan pengujian atau dengan kata lain tidak mengikuti nilai item pernyataan yang tidak valid pada perhitungan selanjutnya.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap

konsisten jika pengukurannya diulang. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria bahwa tingkat alpha dihitung lebih besar dari koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun perhitungan tingkat alpha yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 18. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel *output* SPSS berikut:

**Tabel 24**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	N of items	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	21 item	0,958	Reliabel
X2	22 item	0,934	Reliabel
Y	7 item	0,819	Reliabel

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, seluruh item pernyataan yang valid dalam kuesioner mempunyai *Cronbach's Alpha* > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Jika data tidak berdistribusi normal dapat dipakai statistik non patametrik. Pengujian data sampel dalam penelitian ini menggunakan

*One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan SPSS 18. Kriteria pengujian jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

**Tabel 25**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		17
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.75818140
Most Extreme Differences	Absolute	.180
	Positive	.180
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		.744
Asymp. Sig. (2-tailed)		.637
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada kolom *Unstandardized residual* sebesar  $0,637 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel tidak melebihi 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka model tersebut

tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel *output* SPSS berikut:

**Tabel 26**  
**Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Sumber	.879	1.137
	Daya Insani		
	Penerapan Sistem	.879	1.137
	Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah		

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance Value* lebih besar dari 0,1 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

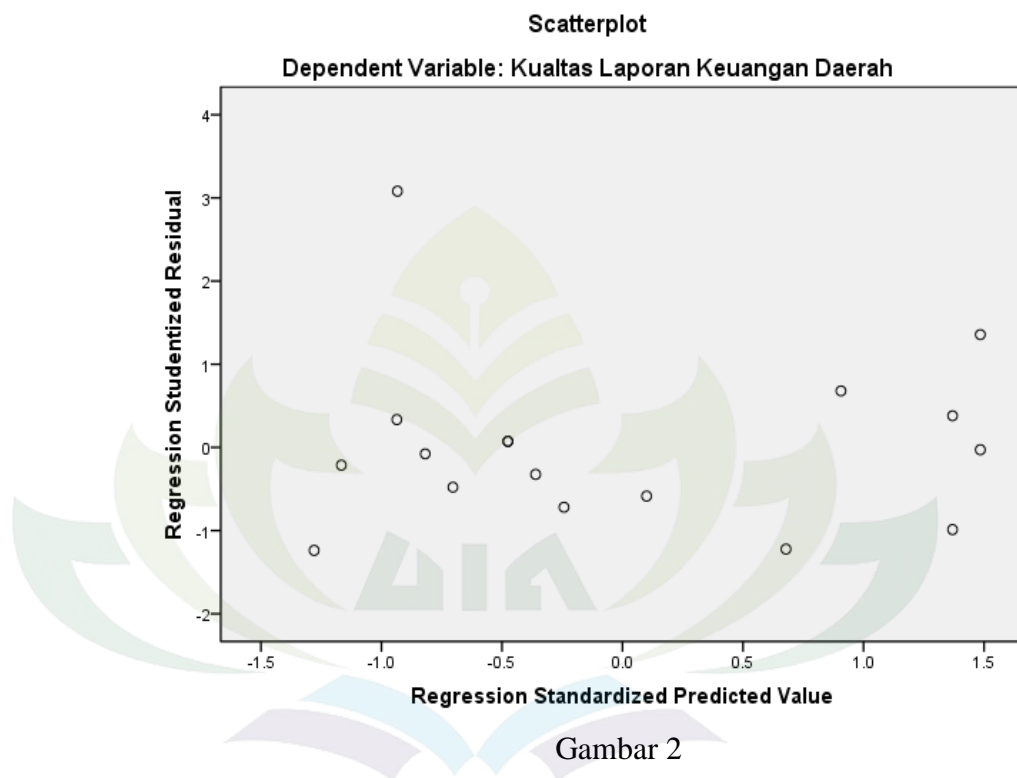
### c. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjalin heteroskedasitas. Mendeteksi heteroskedasitas dengan melihat pola gambar scatterplot dengan kriteria :

- 1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja



- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola



#### Uji Heteroskedasitas

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Dari gambar diatas, terlihat bahwa sebaran titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0. Dapat disimpulkan bahwa Uji Heteroskedasitas penelitian ini model regresi yang baik.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Teknik Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menggambarkan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 27**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.141	1.877		.116
	Kompetensi Sumber Daya Insani (X1)	.298	.024	.977	.000
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X2)	-.292	.426	-.055	.505

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, terdapat terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai hubungan antara variabel X1 (Kompetensi Sumber Daya Insani) dan X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah) terhadap Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah) yaitu sebagai berikut:

$$Y = 3.141 + 0.298 X_1 + (-0.292) X_2$$

Keterangan:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 3.141 menyatakan bahwa jika Kompetensi Sumber Daya Insani (X1) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) nilainya adalah 0, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) nilainya adalah 3.141.
- 2) Koefisien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Insani (X1) sebesar 0.298 menjelaskan bahwa setiap kenaikan nilai Kompetensi Sumber Daya Insani (X1) 1 poin maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.298 poin. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan positif antara Kompetensi Sumber Daya Insani (X1) dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).
- 3) Koefisien regresi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) sebesar -0.292 menjelaskan bahwa setiap kenaikan nilai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) 1 poin maka akan menurunkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0.292 poin. Koefisien bernilai negatif artinya ada hubungan negatif antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

### b. Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) masing-masing berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Adapun hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel *output* SPSS berikut.

**Tabel 28**  
**Uji T (Parsial)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.141	1.877		1.673	.116
	Kompetensi Sumber Daya Insani (X1)	.298	.024	.977	12.203	.000
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X2)	-.292	.426	-.055	-.685	.505

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Sebelum menyimpulkan hipotesis diterima atau ditolak, terlebih dulu menentukan  $t_{\text{tabel}}$  dengan tingkat signifikansi  $< 0,05$  ( $\text{sig.}t < 0,05$ ), hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dan sebaliknya. Pengambilan keputusan yaitu Jika nilai sig

$> 0,05$ , atau  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Jika nilai  $sig < 0,05$ ,  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dalam penelitian ini menggunakan  $t_{tabel}$  dengan taraf signifikan 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n-k-1$  ( $17-2-1 = 14$ ) diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2,145. Adapun hasil keputusan uji secara parsial (uji T) yaitu:

- Pengujian hipotesis variabel kompetensi sumber daya insani ( $X_1$ ) terhadap kualitas laporan keuangan daerah ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel kompetensi sumber daya insani memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 12,203 dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa  $t_{hitung} 12,203 > t_{tabel} 2,145$  maka  $H_0$  ditolak sehingga variabel kompetensi sumber daya insani secara statistik dengan  $\alpha = 5\%$  memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai ( $sig. 0,000 < 0,05$ ).

- Pengujian hipotesis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_2$ ) terhadap kualitas laporan keuangan daerah ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,685 dengan signifikansi 0,505. Hal ini berarti bahwa  $t_{hitung} -0,685 < t_{tabel} 2,145$  maka  $H_0$  diterima sehingga variabel Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara statistik dengan  $\alpha = 5\%$  tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai (sig. 0,505 > 0,05).

**c. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Adapun hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel *output* SPSS berikut.

**Tabel 29**  
**Uji F (Simultan)**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.273	2	53.637	81.644	.000 <sup>a</sup>
	Residual	9.197	14	.657		
	Total	116.471	16			

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X2), Kompetensi Sumber Daya Insani (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, pada kolom F diatas nilai  $F_{hitung}$  adalah 81,644. Sedang kan pada  $F_{tabel}$  diperoleh nilai dari  $(df) = n-k$  ( $17-2=15$ ) dan menghasilkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,68. Nilai tersebut menjelaskan bahwa  $F_{hitung} 81,644 > F_{tabel} 3,68$  sehingga dapat disimpulkan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa variabel kompetensi sumber daya insani (X1) dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) secara bersama-sama atau simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

#### 4. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Tujuannya untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Adapun hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel *output* SPSS berikut.

**Tabel 30**  
**Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.960 <sup>a</sup>	.921	.910	.811

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X2), Kompetensi Sumber Daya Insani (X1)

*Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil uji determinasi pada *output* Model Summary dari analisis regresi linear berganda tepatnya pada kolom Adjusted R Square sebesar 0,910. Jadi pengaruh kompetensi sumber daya insani dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu 91%, sedangkan sisanya 9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## E. Pembahasan

### 1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Insani berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat ditulis persamaan regresi  $Y = 3,141 + 0,298 X_1$ . Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Kompetensi Sumber Daya Insani mempunyai nilai positif. Nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi oleh variabel independen Kompetensi Sumber Daya Insani. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Kompetensi Sumber Daya Insani maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  sebesar 12,203 dimana lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 2,145.

Kompetensi sumber daya insani merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sumber daya insani dalam Islam harus berlandaskan pada sifat Nabi Muhammad SAW yaitu *Shiddiq* (jujur/benar), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan) dan *Fathanah* (cerdas). Konsepsi manajemen modern maupun nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi manajemen Islami memiliki banyak kesamaan yaitu bahwa hendaknya



setiap pekerjaan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Islam juga menekankan pentingnya akhlaq/etika dalam berkerja. Dalam arti luas harus memiliki nilai moral dan akhlak karena segala sesuatu didunia ini diatur dalam aturan yang telah disepakati bersama. Jika ini tidak diperhatikan maka akan terjadi pelanggaran nilai-nilai agama yang dapat merugikan masyarakat, bangsa, dan diri sendiri. Kualitas sumber daya insani juga dituntut untuk memiliki pendirian yang teguh terhadap segala ucapan dan perbuatannya, agar tidak mudah terjerumus kedalam hal-hal yang bisa merugikan dirinya dan orang lain. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. Hud Ayat 112 :

فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Hud : 112).

Sumber daya insani yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya insani maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi Andini dan Yusrawati (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” yang menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber

daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Insani, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan semakin baik sehingga laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

## **2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, dapat ditulis persamaan regresi  $Y = 3,141 + (-0,292) X_2$ . Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai nilai negatif yaitu -0,292. Nilai signifikansi sebesar 0,505 > 0,05 yang berarti variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat tidak dipengaruhi oleh variabel independen Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  sebesar -0,292 dimana lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 2,145.

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada indikator Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku Umum pada pernyataan 9 yaitu “transaksi pada dinas ini dilakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi” responden dengan 23,5% menjawab Sangat Setuju, 35,5% menjawab Setuju, dan 41% menjawab

Tidak Setuju. Sedangkan pernyataan 14 yaitu “Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, surat tanda bukti pembayaran adalah bukti transaksi pengeluaran kas”, responden dengan persentase 100% menjawab tidak setuju (TS). Dari hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti transaksi tidak dikelola dengan baik oleh pegawai Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat. Ini berarti bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat belum diimplementasikan secara maksimal. Hal lain juga menjadi sebab kurang maksimal nya penerapan SAKD pada Kabupaten Pesisir Barat yaitu Sumber Daya Insani yang kurang berkompeten pada bidang nya yang ditunjukkan pada survey bahwa persentase pegawai BPKAD yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi hanya 12%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah saja tidak akan membuat laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat menjadi berkualitas tanpa adanya sumber daya insani yang berkompeten dalam hal pengelolaan keuangan.

### **3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang diajukan yaitu Kompetensi Sumber Daya Insani, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Nilai

signifikansi  $0,000 < 0,05$  menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen. Besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ditunjukkan oleh nilai  $R^2$  sebesar 0,910. Artinya, 91% Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Nilai  $F_{hitung} 81,644 > F_{tabel} 3,68$ .

Hal ini berarti bahwa jika Sumber Daya Insani sudah memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan keuangan, maka Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan diimplementasikan secara maksimal dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut PP No. 10 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa ada 4 karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Selain 4 karakteristik tersebut laporan keuangan yang berkualitas harus didukung juga dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi memberikan arahan bahwa lembaga keuangan publik harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan (akuntansi) baik laporan keuangan secara jelas diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al – Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ  
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ  
 بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا  
 الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا  
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al – Baqarah : 282)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila Kompetensi Sumber Daya Insani rendah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang belum memenuhi kebijakan akuntansi dapat menimbulkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang baik.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kompetensi Sumber Daya Insani secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , serta  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $12,203 > 2,145$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Insani yang berkompeten pada bidang pengelolaan keuangan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan semakin baik.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $0,505 > 0,05$ , serta  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,685 < 2,145$ ). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah saja tidak akan membuat laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten

Pesisir Barat menjadi berkualitas tanpa adanya sumber daya insani yang berkompeten dalam hal pengelolaan keuangan.

3. Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , serta  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $81,644 > 3,68$ ). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Insani dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan semakin baik.

## **B. Saran**

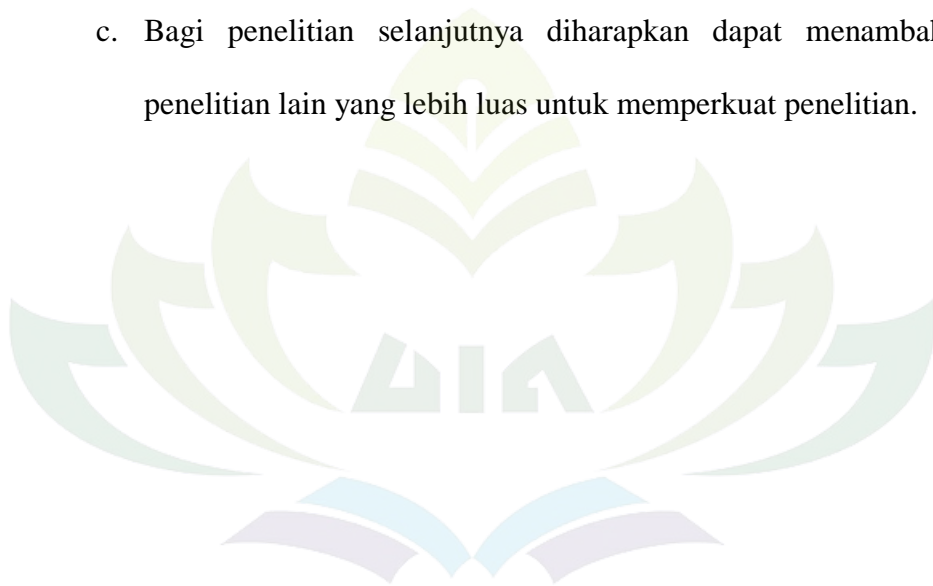
Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
  - a. Meningkatkan kompetensi pegawai penatausaha keuangan dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya pegawai penatausaha keuangan yang memiliki keterampilan rendah dalam bidang akuntansi.
  - b. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Insani yang dimiliki pegawainya dengan mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan terutama di bidang keuangan.



## 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode survey dengan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen serta menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali penelitian ini.
- c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian lain yang lebih luas untuk memperkuat penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Wadoud Muoustafa Moursi El-Seoudi, *Human Resources in The Islamic Banks*, Medwell Journals, Vol. 6. No.2. 2012.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2. Bandung: CV Ponegoro, 2009.
- Al – Qur'an dan Terjemah Al – Aliyy . Bandung: CV Diponerogo, 2006.
- Alam S. *Akuntansi Untuk Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Esis, 2004.
- Alwi, Hasan. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1
- Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Bina, Ahda. *Dahsyatnya 4 Sifat Nabi*. Surakarta: Sajada, 2013.
- Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8* (Cet. VIII). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2018 (On – line), tersedia di : <http://www.bpk.go.id/ihps>. (10 Desember 2018)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intsansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Lillrank, Paul. 2003. “*The Quality of Information*”, Internasional Journal of Quality & Reliability Management Vol. 20 No 6

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. VII*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Midjan, La dan Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi 1 Edisi 8*, Bandung: Lingga Jaya, 2001.

Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.

Pedoman Penulisan Karya Ilmia Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 2018.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama 12 pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung kembali memperoleh opini keuangan WTP (On – line), tersedia di: <http://lampung.tribunnews.com/2018/06/06/pemprov-lampung-raih-wtp-4-kali-berturut-urut> (10 Desember 2018).

Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli (On – line), tersedia di : <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581> (19 januari 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 232 ayat (3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviw atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Lampiran I.01, Kerangka Konseptual – 10.

Perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat (On – line), tersedia di: [http://www.bandarlampung.bpk.go.id/?page\\_id=7735](http://www.bandarlampung.bpk.go.id/?page_id=7735) (10 Desember 2018).

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2018.

Veithzal Rivai. *Islamic Human Capital Ed 1*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Veithzal Rivai. *Kepemimpinan dan Prilaku Orang*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Wati, Kadek Desiana. et.al. 2014. *Pengaruh kompetensi sdm, penerapan SAP, dan system Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Daerah*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 No 1.

Wibowo. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia, 2007.

